

KK
Per 44/01
Sari
e

SKRIPSI

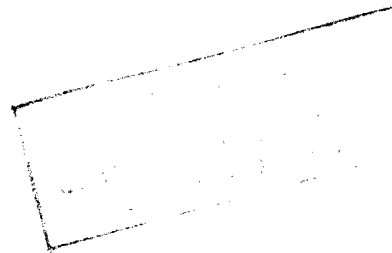
POPPY VITRIANA SARI

EKSISTENSI PERJANJIAN LEASING DALAM HAL LESSOR PAILIT



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001

EKSISTENSI PERJANJIAN LEASING DALAM HAL LESSOR PAJIT



SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK MERAHAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Lisman Iskandar, S.H., M.S.
NIP. 130 675 526

Penyusun,

Poppy Vitriana Sari
NIM. 039714493

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

BAB IV

PENUTUP

I. Kesimpulan

- a) Leasing merupakan lembaga pembiayaan non-bank yang baru keberadaannya di Indonesia dan merupakan improvisasi dari sewa menyewa. Hingga saat ini mengenai perjanjian leasing ini masih belum diatur secara khusus dalam suatu undang-undang, sehingga perjanjian leasing yang berkembang dewasa ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam pasal 1338 B.W., sehingga pengaturannya lebih banyak diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan bersama kedua belah pihak untuk menentukan apa isi dari perjanjian leasing tersebut.
- b) Dalam hal adanya putusan pailit ditengah pelaksanaan perjanjian leasing belum berakhir, maka pihak yang mempunyai kepentingan (lessee) dengan pihak yang dinyatakan pailit (dalam hal ini adalah pihak lessor) dapat meminta kepada Kurator untuk memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut, apakah perjanjian tersebut dapat dilanjutkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kurator dan pihak lessee, ataukah perjanjian leasing tersebut harus berakhir. Dengan diakhirinya perjanjian tersebut maka lessee dapat menuntut ganti rugi.

2. Saran

- a) Perlu adanya pengaturan mengenai leasing yang dituangkan dalam suatu Undang-Undang sehingga dapat memberikan dasar hukum dari keberlakuan leasing ini, karena selama ini pelaksanaan leasing ini sepenuhnya didasarkan pada kesepakatan para pihak dengan syarat tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah yang ada.
- b) Dalam Undang-Undang kepailitan yang ada, pihak yang dinyatakan pailit adalah pihak Debitur. Sesuai dengan penulisan ini dan permasalahan hukum yang makin kompleks, maka diharapkan dapat ditambahkannya pembahasan mengenai pihak kreditur yang dinyatakan pailit beserta akibat hukumnya.